

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Thomas Hobbes dan N. Machiaveli dalam buku Bob Sugeng Hadiwinata yang berjudul Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis (2017: 2) megutarakan bahwa sifat egois dan agresif merupakan perilaku alami manusia. Realisme kemudian dijadikan sebagai perspektif utama teori Hubungan Internasional karena mengedepankan skala penting, yang diantaranya:

1. Jika terdapat aktor selain negara, maka negara merupakan aktor utama hubungan internasional;
2. Kepentingan nasional mempengaruhi kebijakan politik luar negeri dalam melakukan hubungan internasional;
3. Kebijakan luar negeri dapat dibedakan dengan politik dalam negeri dengan sangat jelas karena menyangkut dua perangkat analisis yang berbeda; dan
4. Upaya untuk memperoleh kekuasaan merupakan prinsip hubungan antar negara.

Budiono Kusumohamidjojo dalam buku karya P. Anthonius Sitepu yang berjudul *Studi Hubungan Internasional* (2011:20) memiliki pendapat yang sama dengan menjelaskan bahwa kajian hubungan internasional merupakan sesuatu hubungan antar bangsa yang kajiannya membahas tentang politik, ekonomi, diplomasi, hingga hukum tetapi lebih menitikberatkan pada aspek politik dan hukum sehingga keduanya merupakan aspek yang dominan.

Penekanan pada aspek politik adalah aspek material yang diperuntukkan bagi kepentingan militer, ekonomi dan budaya. Sedangkan aspek hukum merupakan aspek formal dalam bentuk penyelesaian prosedural berbagai kepentingan.

Van Ness dalam Jurnal Azwar Asrudin dengan judul *Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma* (2014:115) melihat terjadinya konfrontasi terhadap pandangan realisme akibat saling ketergantungan hubungan antar negara. Sebagai contoh, suatu negara tidak bisa berhasil dalam membangun perjanjian perdagangan bebas dengan menerapkan *zero-sum strategy* yang menguntungkan terhadap negaranya sendiri, karena negara-negara lain tentunya tidak akan ikut bergabung. Cara untuk menarik berbagai pihak agar berpartisipasi dalam perdagangan internasional adalah dengan menggunakan strategi *win-win solution*.

Pandangan dunia terhadap hubungan internasional mencakup terhadap berbagai bidang seperti keamanan, kekayaan, kebebasan, atau keadilan sosial. Hubungan internasional merupakan bentuk sebab akibat, terutama dengan cara yang dianggap relevan untuk menjelaskan setiap identifikasi masalah. Berbagai

pandangan di seluruh dunia mengamati beberapa jenis masalah, aktor, tujuan, dan jenis hubungan, sementara di sisi lain, hubungan internasional mengabaikan sesuatu yang lain (Griffiths dalam Mulyana, 2018: 1).

2.1.2 Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan salah satu bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, budaya dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara (Ikbar, 2014: 273).

Setiap negara dalam melakukan kerjasama internasional tentunya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, sehingga dengan adanya lembaga dapat menekan biaya dan dapat memberikan informasi dalam kerjasama. Prinsip pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara bersifat universal guna membentuk kondisi yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Para pihak yang bekerja sama dapat membedakan bentuk interaksi berdasarkan hubungan antar negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

2.1.3 Hubungan Bilateral

Kindleberger dalam buku P.Anthonius Sitepu dengan judul Studi Hubungan Internasional (2011: 163) menjelaskan hubungan antara negara tercipta karena terdapat perbedaan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka

kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional.

Menurut T. May. Rudy, Hubungan bilateral adalah saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia yang merupakan fakta yang dijalani setiap negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan (Rudy, 2005:5). Sejak awal mulanya kerjasama yang menghasilkan kondisi saling menguntungkan, negara-negara secara tidak langsung mengalami saling ketergantungan antara satu sama lain. Begitu juga dengan pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional, meningkatkan interdependensi antara negara dan hal tersebut menekan dan mengurangi konflik kekerasan antara negara (Jackson dan Sorensen, 2009: 148).

Hubungan bilateral merupakan salah satu bentuk ilustrasi hubungan timbal balik antara kedua pihak yang terlibat. Aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral tersebut adalah negara (Perwita dan Yani, 2005: 28).

Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga pola, yang antara lain:

- Memelihara kepentingan nasional
- Memelihara perdamaian
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:29).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan elemen yang sangat krusial bagi kebutuhan negara. Tujuan mendasar sekaligus faktor penentu yang mengarahkan para pengambil keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau yang berkaitan dengan cita-cita. “Kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan negara berdaulat dalam menghadapi negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya.” (Plano dan Olton dalam Putera, 2017: 35)

Konsep *National interest* digunakan untuk menjabarkan sifat politik luar negeri suatu negara. Karakteristik politik luar negeri suatu negara berasal dari kepentingan nasional tersebut, dijelaskan oleh T May Rudy (2002: 116) yang mengutarakan bahwa setiap tujuan yang mengacu kepada cita – cita bangsa menjadikan kepentingan nasional sebagai kelangsungan hidup dan kebutuhan rakyat serta kesejahteraan yang menjadi dasar dalam merumuskan kepentingan setiap negara.

2.1.5 Peran Negara

Soerjono Soekanto (2002: 243) menyatakan bahwa peran adalah aspek jabatan atau status. Ketika seseorang menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia secara fungsional telah berperan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka seseorang tersebut menjalankan suatu fungsi. Pada dasarnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* (2009: 132) peran pemerintah secara umum tampak dalam berbagai bentuk seperti fungsi regulasi, fungsi perumusan berbagai jenis kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Pemerintah dalam menetapkan fungsi dan tugas harus berpedoman pada tujuan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dari tujuan dasar ini kemudian ditentukan melalui fungsi-fungsi, dan fungsi tersebut dibagi menjadi tugas. Dari tugas-tugas tersebut dibentuklah organ pelaksana (lembaga). Dengan demikian, lembaga negara dan pemerintahan sehari-hari dapat diatur sesuai dengan tujuan dasar negara.

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga organ negara. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam (Asshiddiqie, 2004: 60-61) yang dimaksud dengan "lembaga" diartikan sebagai asal mula dari apa yang menjadi sesuatu, bentuk asli (rupa, wujud); acuan, ikatan; badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan

suatu usaha; dan pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

(Martincus, Carballo, Garcia, 2010:191) lebih memfokuskan analisisnya pada dampak dari lembaga dan program pengembangan ekspor terhadap kinerja ekspor berdasarkan skala bisnis perusahaan. Pada banyak Negara, sejak awal program tersebut dikembangkan dengan fokus untuk membantu pengusaha menengah dan kecil. Hasil analisis mendukung bahwa program tersebut berdampak lebih besar pada pengembangan ekspor usaha kecil dan menengah. Pasalnya, perusahaan skala kecil dan menengah tidak mampu atau merasa terlalu mahal untuk melakukan berbagai upaya penetrasi pasar ekspor, seperti mencari informasi pasar, klien, regulasi di negara pengekspor. Indonesia termasuk dari berbagai negara yang kini mengembangkan lembaga pemerintah untuk mendukung pengembangan ekspor, dengan skala yang bervariasi yang tercermin dari alokasi anggaran untuk lembaga tersebut (Martincus, Carballo, Garcia, 2010:191).

Secara umum, lembaga pengembangan ekspor dikenal sebagai *Commercial Attache* (Atase dan Perdagangan) atau *Export Promotion Agency* (EPA), dan ITPC merupakan EPA milik Indonesia . Lembaga ekspor di luar negeri memiliki dua tahapan atau pendekatan untuk melakukan analisis. Pendekatan pertama adalah mengevaluasi secara kelembagaan (proses manajemen) dan pendekatan kedua adalah dengan menganalisis dampak keberadaan lembaga sejenis EPA terhadap kinerja ekspor (Martincus dan Carballo, 2008:21). Target yang dibebankan oleh Kementerian Perdagangan untuk ITPC akan dijelaskan pada bagian pembahasan.

2.1.6 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional tidak lepas dari disiplin Ilmu Ekonomi itu sendiri. Samuelson dan Nordhaus dalam buku *Macroeconomics*, menjelaskan bahwa Ilmu Ekonomi memiliki arti “Analisis tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan komoditas yang berharga dan mendistribusikannya kepada masyarakat luas” (Samuelson, 2001: 4).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap individu dapat memanfaatkan atau mengolah sumber daya yang ada menjadi komoditas di berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga harus ada batasan dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

Ricardo dalam buku Brown yang berjudul *Understanding International Relations* menyatakan bahwa, negara-negara mengkhususkan terhadap produk tertentu terutama karena pertimbangan biaya komparatifnya paling rendah, bukan karena keunggulan absolut atas negara lain (Brown 2001: 154-156).

Oleh karena itu, meskipun suatu negara memiliki keunggulan absolut atas suatu produk, negara tersebut mungkin saja bukan merupakan pengekspor produk tersebut, selama biaya komparatifnya lebih mahal daripada jika diproduksi oleh negara lain. Hal ini bisa berasal dari faktor produksi tertentu misalnya; tenaga kerjanya yang murah, ketersediaan bahan mentah, ataupun teknologinya, sehingga suatu negara mencapai tahap efisiensi yang lebih, ketimbang yang lain. Secara ringkas David Ricardo dalam buku *Introduction to International Relations*

menyatakan bahwa aktifitas perdagangan bebas akan membawa keuntungan bagi semua partisipan, sebab perdagangan ini akan menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi akan meningkatkan efisiensi, dan secara otomatis juga meningkatkan produktifitas (Jackson & Sorensen 2009: 235).

Tom Conley dalam buku Martin Griffiths dengan judul *International Relations Theory for the Twenty-first Century: An Introduction* (2007:135) Ekonomi Politik harus mempertahankan fokusnya pada interaksi variabel politik dan ekonomi, namun tidak di dominasi ekonomi baik dalam materi maupun metodologi. Upaya untuk melukiskan bidang topik yang 'sesuai' atau menerapkan metodologi tertentu akan mengarah pada masalah yang sama yang berkembang selama abad kedua puluh dengan pemisahan ilmu politik dan ekonomi dan pemisahan Hubungan Internasional dari *high politics* dan *low politics*.

2.1.7 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan antara suatu negara dengan negara lain dan melintasi batas negara, saling bergantung satu sama lain dengan menerapkan aturan konservatif, bilateral, regional, atau yang disepakati secara internasional melalui kesepakatan atau partisipasi dalam suatu institusi global. Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang melibatkan pelaku usaha individu, serta pemerintah yang ingin bertransaksi jual beli barang dan jasa yang diproduksi di negara lain. Keleuasaan untuk menentukan dan menentukan produk tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan barang, harga dan jasa.

Penawaran dan permintaan menjadi substansi perdagangan, sehingga setiap negara saling membutuhkan serta bergantung terhadap produk barang dan jasa. Teori Perdagangan Internasional muncul dari adanya hubungan antara perekonomian, serta barang dan jasa yang akan meningkatkan devisa untuk pembiayaan impor. (Purwito dan Indriani 2015: 1-2)

(Feriyanto, 2015: 20) menjelaskan bahwa tujuan dari setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain adalah untuk memperoleh manfaat seperti barang yang tidak dihasilkan negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas dan menambah keuntungan serta pasar, dan transfer teknologi modern.

2.1.8 Ekspor dan Impor

Menurut Curry (2001: 145) ekspor adalah barang dan jasa yang dijual ke luar negeri untuk ditukar dengan barang lain, misalnya berupa barang atau uang. Proses ekspor secara umum adalah pengiriman barang atau komoditas dari dalam negeri untuk diimpor ke negara lain. Ekspor barang biasanya memerlukan campur tangan dari bea cukai baik di negara pengirim maupun penerima.

Mankiw (2012:128) menyebutkan juga bahwa ekspor merupakan kegiatan menjual berbagai jenis barang dan jasa dari negara pemasok ke luar negeri.

Menurut Susilo (2008: 101) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (dalam negeri). Pengertian tersebut dapat di definisikan bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan

dua perusahaan antar dua negara tersebut, di mana satu pihak bertindak sebagai penjual (eksportir) dan satunya sebagai pembeli (importir).

Sedangkan menurut Tanjung (2011: 379) transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini dapat diwakili oleh kepentingan kedua perusahaan antara kedua negara yang berbeda dan tentunya juga regulasi dan bertindak sebagai pemasok dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013:13).

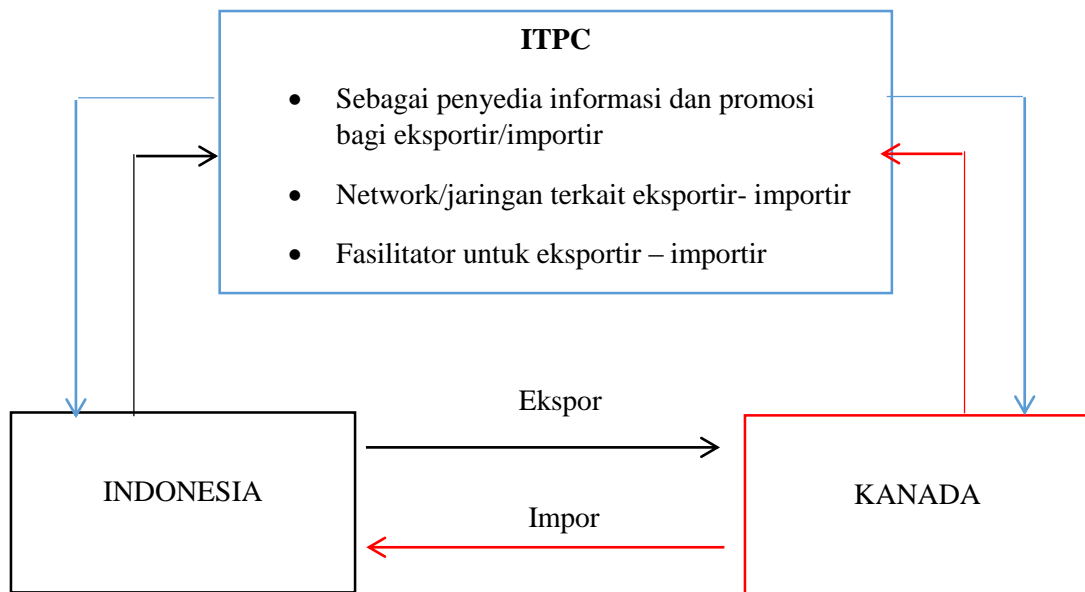
2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kanada terdapat kepentingan bagi kedua negara, seperti kerjasama perdagangan melalui ekspor dan impor yang diharapkan dapat membantu memenuhi kepentingan kedua negara. Dalam pelaksanaannya, meliputi berbagai aspek teori dari Hubungan Internasional seperti Kerjasama Internasional, dalam hal ini dalam bentuk hubungan bilateral, lalu teori ekonomi politik internasional, karena merupakan bentuk perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya, maka interaksi ekonomi merupakan interaksi politik dalam arena internasional, sehingga interaksi kedua negara merupakan bentuk dari ekonomi

politik internasional. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori ekspor dan impor yang diperoleh dari buku, seperti Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor oleh Tanjung, Buku Pintar Ekspor – Impor oleh Susilo dan Dasar-Dasar Ekspor Impor oleh Purnamawati.

Dalam hubungan kerjasama antara kedua negara, *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) merupakan lembaga perwakilan kementerian perdagangan dengan bertujuan untuk mempromosikan serta memberi informasi perdagangan kedua negara, yang beroperasi di berbagai negara, salah satunya di Vancouver, Kanada.

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Kanada dilakukan karena mengingat Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak mengingat kedua negara berupaya untuk saling memenuhi kebutuhan nasional masing – masing, dan kerjasama perdagangan melalui ekspor – impor dianggap dapat membantu kedua negara seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui barang yang di ekspor serta memperoleh fasilitas serta teknologi yang maju, juga bagi Kanada untuk memperoleh komoditas yang dibutuhkan dari Indonesia dalam hal ini, contohnya Kanada merupakan salah satu negara yang sering mengimpor komoditas kopi dari Indonesia. Selain itu, peneliti ingin melihat dari sudut pandang ITPC yang merupakan perwakilan pemerintah dalam mempromosikan komoditas ekspor Indonesia.



Gambar 2.1 Diagram Alur Kerangka Pemikiran